

Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 Dinilai Tak Realistis

JAKARTA – Target pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2023 berkisar 5,3-5,9% dinilai tak realistis. Sebab, tantangan ekonomi yang akan dihadapi Indonesia tahun depan jauh lebih kompleks.

Oleh **Triyan Pangastuti**

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, ekonomi Indonesia akan bergerak dinamis, karena sangat bergantung pada kondisi eksternal. Itu artinya, yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9% lebih dari sekadar pelonggaran mobilitas.

Dia memprediksi risiko inflasi yang berasal dari *cost push* masih terjadi tahun depan, seiring volatilitas tajam harga di pasar komoditas. Selama asumsi harga minyak mentah di atas US\$ 80 per barel, inflasi energi yang berpengaruh ke sisi produsen akan meningkat.

“Inflasi juga disumbang dari kenaikan sisi permintaan (*demand pull*), sehingga harus dibarengi dengan anggaran perlindungan sosial yang lebih besar. Ini bukan hanya berkaitan dengan tahun politik menjelang pemilu 2024, tetapi bansos dibutuhkan agar pemulihan ekonomi di semua kelompok pengeluaran masyarakat lebih merata,” tegas dia, akhir pekan lalu.

Lebih lanjut dia menilai, motor pertumbuhan ekonomi tahun depan dari sisi pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi. Dengan asumsi *booming* harga komoditas masih berlanjut, sebagian sektor usaha yang berkaitan dengan perkebunan dan pertambangan akan meningkat, sehingga mengangkat belanja domestik.

Kendati begitu, Bhima menilai, masih



Bhima Yudhistira

ada variabel yang perlu untuk diperhatikan pemerintah, yakni terkait regulasi. “Bukan tidak mungkin, demi stabilitas harga, akan terjadi proteksionisme dagang seperti pelarangan ekspor tambang atau hasil pangan” ucap dia.

Kemudian, demikian Bhima, lonjakan harga energi dan pangan diproyeksikan masih terjadi bukan saja karena minyak mentah tinggi, tetapi biaya produksi pangan naik, ditopang lonjakan harga pupuk global rata-rata 70% dalam setahun terakhir.

“Kenaikan harga pupuk urea maupun DAP memicu inflasi pangan di berbagai negara. Nampaknya situasi komoditas belum akan normal dalam 1-2 tahun ke depan,” tegas dia.

Diamenambahkan, belanja pemerintah diperkirakan disesuaikan demi mengejar target defisit APBN di bawah 3%. Namun, beberapa belanja yang populis, seperti bansos dan persiapan pemilu akan didorong. Terlepas hal tersebut, porsi

belanja pemerintah memang tidak bisa di atas 10% produk domestik bruto (PDB).

Meski demikian, Bhima berharap kegiatan ekonomi tahun depan akan mulai pulih. Namun dia belum bisa menyebutkan berapa cepat prosesnya.

“Apakah ekonomi bisa langsung seperti pra-pandemi? Saya kira belum tentu. Ada pemulihan yang sifatnya divergensi, seperti sektor infokom mungkin tumbuh lebih lambat dibanding saat pandemi, tetapi sektor pariwisata transportasi akan tumbuh lebih cepat,” kata dia.

Fondasi 2023

Sementara itu, ekonom Core Yusuf Rendy Manilet mengatakan, capaian pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi penting, sebagai fondasi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tahun depan. Dia menilai, konsumsi masyarakat masih akan menjadi andalan untuk pertumbuhan ekonomi 2023.

Tahun ini, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 4,5-5,2%. Realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2022 mencapai 5,01%.

Faktor kedua, dia, pemerintah harus terus menjalankan strategi menjaga daya beli. Dari sisi kebijakan fiskal, meski anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sudah tidak disalurkan, pos belanja perlindungan sosial perlu dipastikan tersalurkan secara baik.

“Data penyaluran seharusnya sudah jauh lebih baik, baik dari sisi jumlah nominal bantuan dan pe-

nerima bantuan. *Inclusion* dan *exclusion error* tahun ini perlu dipastikan sudah dibenahi untuk dapat digunakan secara optimal,” ucap dia.

Kendati begitu, diia menilai ada beberapa sektor yang masih berada dalam tahapan pemulihan, seperti pariwisata. Namun, dengan asumsi pemulihan ekonomi bisa dicapai tahun ini, pemulihan pariwisata seharusnya berada dalam tahapan terakhir.



BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Komitmen Untuk UMKM

Perajin menyelesaikan pembuatan ikat cincin dari tembaga di salah satu pameran UMKM di Serpong, Tangerang, Banten, Minggu (22/5/2022). Pemerintah berkomitmen kuat memberikan perhatian besar untuk UMKM yang dikelola perempuan, tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, UMKM terbukti bisa memberikan kontribusi hingga 40% dari pendapatan nasional di negara berkembang dan mampu menyerap banyak tenaga kerja.



sinarmas multiartha

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri :

- I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada :
- | | |
|----------------|--|
| Hari / Tanggal | : Selasa, 14 Juni 2022 |
| Waktu | : 09.30 WIB sampai selesai |
| Tempat | : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39
Jl. M.H. Thamrin No.51,
Jakarta Pusat 10350 |
| E-RUPS | : aplikasi eASY.KSEI |

Dengan agenda sebagai berikut :

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sekaligus memberikan dan pembahasan tanggung jawab sepenuhnya (*valleedg acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan : Mata Acara wajib dalam RUPST sesuai dengan pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.
Penjelasan : Mata Acara wajib dalam RUPST sesuai dengan pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
- Persetujuan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2022.
Penjelasan : Sesuai dengan pasal 113 UUPPT Ketentuan tentang pembayaran gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS
- Pemunjukkan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya serta persetujuan memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Penjelasan : Sesuai dengan pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPPT”), dan Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terutama bahwa penunjukan Akuntan Publik harus melalui RUPS dan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, dimana penunjukkan Akuntan Publik harus melalui RUPS.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap 1 Tahun 2021
Penjelasan : guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

- II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal	: Selasa, 14 Juni 2022
Waktu	: Setelah selesai RUPST
Tempat	: Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39 Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350
E-RUPS	: aplikasi eASY.KSEI

Dengan agenda sebagai berikut :

- Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan : perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan adanya pengunduran diri dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Laporan Perubahan Komite Audit Perseroan
Penjelasan : sehubungan dengan pengunduran diri dan pengangkatan Komite Audit Perseroan.

Ketentuan Umum :

- Perseroan tidak mengimprim undangan khusus kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman Situs situs web Perseroan (www.smma.co.id) situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan aplikasi eASY.KSEI.
- Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilaksanakannya Pemanggilan pada tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2022, sesuai informasi Perseroan di atas.
- Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri dan/atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 20 Mei 2022.
- Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - hadir melalui pemberian kuasa;
- Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
- Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSES (https://akses.ksei.co.id/).
- Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
- Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
- Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan surat dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
- Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - Proses Registrasi
 - Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam penghitungan suara Rapat.
 - Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
 - Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
 - Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "General Meeting Flow Text" adalah "Discussion started for agenda item no. / /".
 - Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - Proses Pemungutan Suara/Voting
 - Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - Pemegang saham yang hadir dalam Rapat atau penerima kuasa yang akan memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no. / / has ended*", maka akan dianggap memberikan suara **Absain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - Tayangan RUPS
 - Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSES (https://akses.ksei.co.id/).
 - Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
 - Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran persama tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam **Tayangan RUPS** merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau **Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

- Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs Web Bursa Efek Indonesia, [situs web KSEI/sistem eASY.KSEI] dan situs web Perseroan.
- Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19:
 - Dengan sepenuhnya memperhatikan arahan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pencegahan Penyebaran Virus COVID19, meskipun Perseroan juga akan mengadakan Rapat secara fisik bagi Pemegang Saham, kehadiran fisik peserta Rapat akan dibatasi dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan dan penaturan penundangan yang berlaku mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial/perkumpulan massa (PSBB/PPKM). Oleh karena itu, Perseroan dengan ini memberikan imbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dapat menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa:
 - secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang telah disediakan oleh KSEI kepada Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yakni Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita. Atau
 - dengan mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan www.smma.co.id . Surat kuasa bermeterai beserta dokumen pendukungnya wajib diterima oleh *Corporate Secretary* Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat dilaksanakan yakni pada hari Kamis, 9 Juni 2022 pukul 16.00.

- Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Memiliki sertifikat vaksin Covid-19 dengan dosis lengkap yang dibuktikan melalui aplikasi PeduliLindungi dan melakukan pemindaian QR Code aplikasi PeduliLindungi saat memasuki ruang Rapat.
 - Menggunakan masker selama berada di area tempat Rapat.
 - Bersedia melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki ruang Rapat untuk memastikan Peserta Rapat tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,5 derajat celsius).
 - Menjaga jarak sosial (*Social Distancing*) minimal 1 meter di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - Mengikuti prosedur dan protokol penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.

- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diharapkan sudah hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 Mei 2022

PT Sinar Mas Multiartha Tbk

Direksi Perseroan

Bappenas Prediksi Inflasi 2022 Sentuh 3,8%

JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi inflasi berpotensi meningkat pada bulan-bulan mendatang. Selama tahun ini, Bappenas memprediksi inflasi mencapai 3,8%, dibandingkan 2021 sebesar 1,87%.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, peningkatan inflasi selain disumbangkan kenaikan harga komoditas global, pola musiman, hari besar keagamaan dan nasional (HBKN), Idul Adha, Natal, Tahun Baru, kenaikan tahun ajaran baru, serta persiapan pemilu. Namun, selama pemerintah menjaga komponen harga diatur pemerintah (*administered prices*), seperti tarif bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, inflasi diprediksi tetap stabil dalam rentang sasaran yang ditetapkan, berkisar 2-4% secara year on year (yoy).

“Mencermati perkembangan inflasi kuartal I-2022 serta berbagai risiko yang dihadapi, *outlook* inflasi tahun 2022 diperkirakan sebesar 3,8%,” ucap Amalia saat dihubungi *Investor Daily*, Sabtu (21/5).

Dia mengatakan perkiraan tersebut sejalan dengan proyeksi beberapa lembaga internasional, seperti International Monetary Fund (IMF) yang memperkirakan inflasi 2022 sebesar

4% dan Asian Development Bank (ADB) sebesar 3,6% Di tengah ancaman inflasi global, kondisi ekonomi domestik diyakini tetap berjalan baik.

“Kebijakan APBN tetap fleksibel untuk memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat dan dunia usaha yang paling terdampak,” ucap dia.

Pemerintah, kata dia, melakukan percepatan belanja untuk memberikan subsidi kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Adapun kebijakan upah dilakukan untuk menjaga kesejahteraan pekerja.

“Pada dasarnya, pemerintah melakukan kebijakan yang efektif dan meningkatkan optimisme masyarakat. Masyarakat berpendapatan menengah juga dijaga agar tidak tererosok dalam kemiskinan,” imbuh Amalia.

Sementara itu, dia menilai, bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sektor keuangan yang sinergis akan tetap menstimulasi aktivitas ekonomi domestik, meski tekanan inflasi cukup tinggi. Contohnya, pemerintah dan Bank Indonesia semakin solid dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) dalam menjaga 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).

“Pemerintah akan mengendalikan komponen *administered prices*, yaitu

BBM, tarif listrik, LPG serta menjaga kecukupan pasokan pangan, menjaga kelancaran distribusi, dan pengelolaan pasca panen,” ucap dia.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kandani mengatakan, potensi kenaikan inflasi dalam jangka pendek masih sangat tinggi. Hal ini tidak terlepas pada kondisi perekonomian dalam maupun luar negeri.

Hal ini terjadi, kata dia, karena beberapa faktor. Pertama, ketidakpastian di pasar global akibat konflik Rusia-Ukraina yang terus mendisrupsi pasar global. Akibatnya, normalisasi harga komoditas belum akan terjadi dalam waktu dekat. Hal ini akan meningkatkan beban impor pemerintah dan industri nasional.

“Beban tersebut harus ditanggung masyarakat dalam bentuk pengurangan subsidi atau kenaikan harga jual di pasar,” ucap Shinta.

Kedua, demikian Shinta, kebijakan pemerintah yang sudah terjadwal, yaitu pajak karbon atau batasan *allowance deficit* APBN secara tidak langsung berkontribusi menciptakan kenaikan harga jual barang dan jasa di pasar domestik. Ketiga yaitu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, efek *tapering off*, dan potensi kenaikan suku bunga diperkirakan kuartal II-2022. (**ark**)

Harga Migor Masih Tinggi

JAKARTA – Langkah pemerintah mencabut kebijakan pelarangan ekspor sementara seluruh produk minyak kelapa sawit (*crude palm oil*/CPO) dan turunannya menunjukkan inkonsistensi pemerintah. Sebab, pelarangan ekspor dicabut ketika harga minyak goreng (migor) masih tinggi.

Peneliti Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan, harga migor curah sempat menyentuh Rp 19.800 per liter. Saat pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor CPO, harga migor turun menjadi Rp 17.200-17.600 per liter, tetapi belum mencapai target Rp 14.000 per liter.

Yusuf mengatakan, sisi produksi CPO dalam negeri juga terjadi anomali. Harga migor naik saat petani kelapa sawit mengeluh tidak bisa menjual produk dengan harga layak. Petani sawit terpaksa menjual produk dengan sangat murah, karena suplai sangat melimpah. Secara teoritis, ketika suplai meningkat, seharusnya harga migor turun.

“Ini yang kemudian anomali dan akhirnya tidak konsisten dari apa yang ditargetkan pemerintah untuk kebijakan ini,” kata Yusuf, Sabtu (21/5).

Seperti diketahui, pemerintah akan membuka kembali keran ekspor CPO dan turunannya, Senin (23/5). Kebijakan tersebut diikuti dengan upaya untuk tetap menjamin ketersediaan bahan baku migor. Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengatur pemenuhan kebutuhan domestik (*domestic market obligation*/DMO) dan harga berlaku domestik (*domestic price obligation*/ DPO) yang mengacu pada kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Yusuf melanjutkan, idealnya, pemerintah melihat secara keseluruhan apakah kebijakan pelarangan ini sudah tepat. Lalu, perlu dicek, apakah kenaikan harga minyak goreng terjadi karena masalah distribusi atau masalah lain. Yusuf mengatakan permasalahan yang terjadi harus diselesaikan terlebih dahulu, baru pemerintah membuka kembali ekspor CPO dan produk turunannya.

“Kalau dilihat sekarang, pemerintah langsung membuka keran ekspor. Padahal, kita belum tahu pangkal permasalahan. Ada baiknya pemerintah membuka secara bertahap, untuk memastikan masalah di dalam negeri, apakah dari sisi suplai atau masalah lain,” ucapnya. (**ark**)

Kopi Jadi Komoditas

Penggerak UMKM dan Koperasi

JAKARTA – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, komoditas kopi menggerakkan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi nasional, mulai dari hulu hingga hilir. Buktinya, sebesar 96% perkebunan kopi Indonesia dikuasai oleh 1,3 juta petani dan 2.950 lebih kedai kopi dikelola anak muda dan pelaku ekonomi kreatif.

“Di tengah pandemi Covid-19, setiap negara tengah mencari keunggulan domestik. Ini penting agar Indonesia tidak terus-menerus mengekor ke negara-negara maju. Kopi dan rempah adalah komoditas unggulan negara kita yang harus dikelola dengan baik, dikuasai inovasi teknologinya, punya nilai tambah, menyejahterakan petani, dan berkelanjutan,” ucap Teten, Minggu (22/5).

Namun, dia menilai, ada tiga tantangan untuk pengembangan kopi rakyat, di antaranya lemahnya kelembagaan usaha yang umumnya masih perorangan, rendahnya produktivitas dan kualitas produk UMKM dan koperasi, serta kesulitan akses pembiayaan dan pasar. Dalam hal ini, Kemenkop UKM memberikan dukungan dari hulu dan hilir.

“Dari hulu, kami ingin melakukan penguatan kelembagaan usaha melalui korporatisasi petani kopi berbasis koperasi dan pengembangan model bisnis terintegrasi hulu-hilir dari mulai produksi, akses pembiayaan, rantai pasok, dan pemasarannya,” kata Teten.

Lebih lanjut dia menegaskan, Kemenkop UKM sudah melakukan beberapa *piloting* terkait korporatisasi petani ini. Salah satunya adalah Koperasi Produsen Baitul Qirah Baburrrayan di Aceh Tengah yang diusahakan untuk menguasai pasar ekspor 345,6 ton kopi arabika gayo ke pasar Amerika Serikat dan Eropa. (**ark**)